



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2025



STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PALEMBANG
2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, Juli 2025

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Fisheries, Aquaculture and Fisheries Post (KEMENTERIAN KEHUTANAN, PERIKANAN DAN PERIKANAN) for the Palembang Station of Fish Quarantine, Quality Control and Safety of Fishery Products. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the stamp and extends to the right.

Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi
NIP. 19740225 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	60

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I **Tahun Anggaran 2025** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, Juli 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi
NIP. 19740225 200212 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dengan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada **Tahun Anggaran 2025** adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.36.800.000,00** atau mencapai **51.63 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp.71.275.000,00**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2024** sebesar **47.47.851,00** atau mencapai **31.9 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp.150.000.000,00**

Realisasi Belanja Negara pada **Tahun Anggaran 2025** adalah sebesar **Rp2.276.718.187,00** atau mencapai **39.51 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.762.767.000,00**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2024** sebesar **Rp. 2.694.302.365,00** atau mencapai **44.78 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.016.527.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per **30 Juni 2025**.

Nilai Aset Per **30 Juni 2025** dicatat dan disajikan sebesar **Rp.11.386.164.905,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 113.738.654,00**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp.11.072.426.251,00**, Piutang Jangka Panjang (neto) **Rp. 0,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar

Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp.11.021.341.437,00** dan **Rp11.287.439.299,00.**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan **30 Juni 2025** adalah sebesar **Rp(2.531.478,689,00).** Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp2.568.278.694,00.** sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp30.800,005,00.** Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing defisit sebesar **Rp. 0,00** sehingga entitas mengalami Defisit – LO sebesar **Rp (2.531.478.689,00).**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2025** adalah sebesar **Rp11.287.429.299,00** dikurangi defisit – LO sebesar **Rp(2.531.478.689,00)** dan ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp2.265.380.827,00** kenaikan/penurunan ekuitas **Rp(266.097.862,00)** sehingga ekuitas akhir pada Tanggal **30 Juni 2025** adalah senilai **Rp11.021.341.437,00.**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **30 Juni 2025**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024**

Uraian	Catatan	TA. 2025		% thd	Ta 2024 Realisasi
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	71.275.000	36.800.005	52	47.851.000
Jumlah Pendapatan		71.275.000	36.800.005	52	47.851.000
B. BELENJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.457.718.000	1.784.524.918	52	1.989.449.624
Belanja Barang	B.4	2.305.049.000	492.193.269	21	788.351.941
Belanja Modal	B.5	-	-		
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	0
JUMLAH BELANJA		5.762.767.000	2.276.718.187		2.777.801.565

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN KIPM PALEMBANG
NERACA
Per 30 JUNI 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.10	83.738.654	86.980.454
Jumlah Aset Lancar		113.738.654	86.980.454
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	6.261.306.000	6.261.306.000
Peralatan dan Mesin	C.15	5.206.218.638	5.045.918.638
Gedung dan Bangunan	C.16	5.355.361.197	5.355.361.197
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	349.141.000	349.141.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	94.595.500	94.595.500
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6.194.196.084)	(5.891.552.507)
Jumlah Aset Tetap		11.072.426.251	11.214.769.828
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		11.186.164.905	

KEWAJIBAN			11.301.750.282
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	134.823.468	14.310.983
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum diragihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		164.823.468	14.310.983
JUMLAH KEWAJIBAN		164.823.468	14.310.983
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	11.021.341.437	11.287.439.299
JUMLAH EKUITAS		11.021.341.437	11.287.439.299
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.186.164.905	11.301.750.282

STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni
2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	36.800.000	47.833.000
JUMLAH PENDAPATAN		36.800.000	47.833.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.887.208.386	2.008.352.312
Beban Persediaan	D.3	39.234.945	33.458.626
Beban Barang dan Jasa	D.4	370.539.814	471.461.040
Beban Pemeliharaan	D.5	106.364.711	241.895.871
Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.587.261	72.693.253
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	142.343.577	169.120.127
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.568.278.694	2.996.981.229
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.531.478.694)	(2.949.148.229)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.11			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		-	18.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5	18.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Oprasional		5	18.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.531.478.689)	(2.949.130.229)
POS LUAR BIASA			
D.12			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.531.478.689)	(2.949.130.229)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	11,538,222,429	11,979,902,470
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-2,780,100,102	(3,769,017,894)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	5,968,750	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	5,968,750	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2,648,501,365	3,418,992,162
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	-125,539,987	(350,025,732)
EKUITAS AKHIR	E.5	11,412,682,442	11,629,876,738

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan PERMENKP 48 PERMENKP Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman

Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, dan perubahan organisasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padlembang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

yang berkelanjutan;

3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang

Keuangan

dikelola oleh Stasiun KIPM Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun KIPM Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Palembang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *automatic adjustment* (blokir anggaran) sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH BLOKIR
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina	1,700,000	1,700,000
Pendapatan,Pengujian,Sertifikasi,K	148,300,000	148,300,000
Jumlah Pendapatan	150,000,000	150,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,164,170,000	4,064,116,000
Belanja Barang	2,852,357,000	2,976,682,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	6,016,527,000	7,040,798,000

Realisasi

Pendapatan

Rp47.851.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode Semester I Tahun 2025 yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp47.851.000,00 atau mencapai 32persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00. Pendapatan Stasiun KIPM Palembang terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Semester I Tahun 2025

Jenis Pendapatan	2025		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1.700.000	760.000	44,71
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	148.300.000	47.073.000	31,74
Pendapatan Denda	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	-	2.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang	-	16.000	-
Jumlah	150.000.000	47.851.000	31,90

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp(73.402.000,00) atau 13 persen. Perbandingan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2

URAIAN JENIS PNBPN	REALISASI PNBPN (Rp)		NAIK (TURUN) %	
	Semester I TA. 2025	Semester I TA. 2024	Jumlah	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	16.000	14.697.000	(14.681.000)	-99,89
Penerimaan Pengembalian Belanja TAYL	2.000	-	2.000	0,00
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	47.073.000	64.755.000	(17.682.000)	100,00
Pendapatan Denda	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	760.000	401.011.308	(400.251.308)	-99,81
Jumlah	47.851.000	480.463.308	(400.251.308)	-90,04

Perbandingan Realisasi PNBPN TA. 2024 dan TA. 2025

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp2.694.302.365,00 adalah sebesar Rp2.694.302.365,00 atau 45 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.016.527.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja Semester I tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,164,170,000	1,905,950,424	60.24
Belanja Barang	2,852,357,000	788,351,941	27.64
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	6,016,527,000	2,694,302,365	44.78

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Semester II Tahun Anggaran 2025, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar (1) persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu tahun anggaran 2025 lebih kecil dari pagu tahun anggaran 2024, dikarenakan tahun anggaran 2025 tidak terdapat pagu untuk belanja modal

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA. 2024 dan Semester II TA. 2025

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	TA. 2024	TA. 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	1,905,950,424	1,989,449,624	(83,499,200)	(4.20)
Belanja Barang	788,351,941	1,469,186,616	(680,834,675)	(46.34)
Belanja Modal	-	27,000,000	(27,000,000)	(100.00)
Jumlah	2,694,302,365	3,485,636,240	(791,333,875)	(22.70)

*Belanja
Pegawai
Rp1.905.950.424,
00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.905.950.424,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,618,082,000	939,777,713	58.08
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	101,405,000	44,582,324	
Belanja Lembur	145,676,000	85,473,000	58.67
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,299,007,000	836,117,387	64.37
Jumlah Belanja	3,164,170,000	1,905,950,424	60.24

Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2025, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp108.114.688 atau (3,13) persen karena adanya pegawai pindah dan Kenaikan Grade Tunjangan Kinerja dan adanya Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK. Perbandingan realisasi belanja pegawai Semester I Tahun 2024 dan

Semester I Tahun 2025 disajikan tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA. 2024 dan Semester I TA. 2025

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)	
	TA. 2024	TA. 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	939,777,713	2,104,575,940	(1,164,798,227)	(55.35)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	44,582,324			
Belanja Lembur	85,473,000	192,210,000	(106,737,000)	(55.53)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	836,117,387	1,767,195,620	(931,078,233)	(52.69)
Jumlah Belanja	1,905,950,424	4,063,981,560	(2,202,613,460)	(163.56)

Belanja Barang
Rp788.351.941.,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp788.351.941,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Semester I Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	717,710,000	295,188,734	41.13
Belanja Barang Non Operasional	470,512,000	5,790,000	1.23
Belanja Jasa	486,120,000	167,226,075	34.40
Belanja Pemeliharaan	572,543,000	241,895,871	42.25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	475,012,000	72,693,253	15.30
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130,460,000	5,558,008	4.26
Jumlah Belanja	2,852,357,000	788,351,941	27.64

Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester I TA. 2024, terdapat penurunan sebesar (Rp107.291.350,00) atau 7,79 persen karena terdapat blokir pagu anggaran TA. 2025 yang

mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda, dan penyerapan anggaran menjadi rendah. Perbandingan realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	Semester I 2024	Semester I 2023	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	295,188,734	388,000,500	(92,811,766)	(23.92)
Belanja Barang Non Operasional	5,790,000	86,257,500	(80,467,500)	(93.29)
Belanja Jasa	167,226,075	296,587,050	(129,360,975)	(43.62)
Belanja Pemeliharaan	241,895,871	240,376,200	1,519,671	0.63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	72,693,253	168,797,100	(96,103,847)	(56.93)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,558,008	197,725,500	(192,167,492)	(97.19)
Jumlah Belanja	788,351,941	1,377,743,850	(589,391,909)	(42.78)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp00,00

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun 2025 disebabkan tidak adanya pagu anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2025.

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester I Tahun 2025, terdapat

Tabel 11
Perbandingan Belanja Modal Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	TA. 2024	TA. 2023	Jumlah	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	372,719,988	(372,719,988)	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	197,650,957	(197,650,957)	(100.00)
Jumlah Belanja	0	570,370,945	(570,370,945)	(100.00)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Intrakomptabel dan ekstrakomptabel Semester I Tahun 2025.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2025. Sedangkan Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik/ Turun	
	2024	2023	Jumlah	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0	-
Tugu/ Tanda Batas	0	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Semester I Tahun Anggaran 2025.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp90.953.854,00

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing – masing sebesar Rp.90.953.854,00 dan Rp.49.537.472,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

No	Aset Lancar	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	-
2	Belanja dibayar dimuka(prepaid)	-	-
3	Ka Lainnya dan Setara Kas	2,642,000	-
4	Persediaan	28,311,854	49,537,472
5	Persediaan yang belum diregister	-	-
Jumlah		90,953,854	49,537,472

*Kas di Bendahara
Pengeluaran*

Rp60.000.000,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.60.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025

No	Keterangan	30 Juni 2024
1	Uang di Rekening Bank	-
2	Saldo UP (Uang tunai di brankas bendahara)	-
3	Kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan	-
Jumlah		-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNBPN langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.642.000,00*

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp2.642.000,00 dan Rp0,00. Ini merupakan LS Perjalanan Dinas yang masih ada di rekening bendahara.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB **C.1.4 Piutang PNB**

Rp0,00

Saldo Piutang PNB per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar **C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan**
Tagihan **Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar **C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak **C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**

Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan per 31 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Belanja Dibayar di Muka Rp0.00 **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

Dibayar di Muka Rp0.00 Saldo Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00,- dan Rp0.00,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00 **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Harus Diterima Rp0,00 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp 28.311.854,00 **C.1.10 Persediaan**

Persediaan Rp 28.311.854,00 Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.311.854,00 dan Rp49.537.472,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan

per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Barang Konsumsi	28,311,854	49,537,472
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	28,311,854	49,537,472

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0.00*

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 sebesar Rp0.00.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Tetap
Rp11.510.897.476,
00*

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing – masing sebesar Rp11.510.897.476,00 dan Rp11.504.928.726,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

*Tanah
Rp
6.261.306.000,00*

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Palembang per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.6.261.306.000,00

Rincian Tanah Semester I Tahun 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai BMN	Hasil Penilaian
1	701 m2	JL.Mangku bumi Palembang	320,000,000	1,706,892,000
2	847m2	JL.Akses Bandara In't SMB II Palembang	308,000,000	2,044,721,000
3	590m2	JL.Akses Bandara In't SMB II Palembang	267,270,000	1,413,687,000
4	541m2	JL.Karantina Palembang	190,432,000	1,095,956,000
Jumlah			1,085,702,000	6,261,256,000

*Peralatan dan
Mesin Rp
5.514.901.033,00*

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp5.514.901.033,00 dan Rp5.506.901.033,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per30 Juni 2024	5,867,289,558
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2024	5,867,289,558
Akumulasi Penyusutan s.d. juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	5,867,289,558

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.355.361.197
,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp5.335.361.197,00 dan Rp.5.335.361.197,00 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	5,355,361,197
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan	-
Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Saldo per 30 Juni 2004	5,355,361,197
Akumulasi Penyusutan s.d. juni 2024	-
Nilai Buku per 30 juni 2024	5,355,361,197

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp349.141.000,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp349.141.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	349,141,000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 30 Juni 2024	349,141,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni	-
Nilai Buku per 30 juni 2024	349,141,000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp116.570.500,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 juni 2024 adalah Rp116.570.500,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(6.086.382.254,
00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp(6.086.382.254,00) dan Rp(6.084.351.004). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,867,298,558	5,029,843,204	837,446,354
2	Gedung dan Bangunan	5,355,361,197	634,570,304	4,720,790,893
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	349,141,000	204,482,909	14,498,091
4	Aset Tetap yang tidak d gunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		11,571,800,755	5,868,896,417	5,572,735,338

*Aset Tak
Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.00,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp123.843.888,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp123.843.888,00 dan 16.243.769,00. Ini Merupakan Gaji Induk Pegawai SKIPM Palembang bulan juli 2024 senilai Rp95.577.007,00 Gaji P3K bulan Juli 2024 senilai Rp6.824.881,00 dan Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran senilai Rp2.642.000,00.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp0,00*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

Rp11.538.222.429,

00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp11.538.222.429,00 dan Rp11.979.902.470,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus(Defisit) dari

Kegiatan

Operasional

(Rp2.780.010.102,00))

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 masing – masing sebesar minus (Rp2.780.010.102,00) dan (Rp3.769.017.894,00). Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp.47.833.000,00 dikurangi beban (Rp2.827.861.102,00) dan dikurangi Kegiatan Non Operasional lainnya (Rp18.000,00) .

Pendapatan

PNBP

Rp47.833.000,00

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp47.833.000,00 dan Rp66.644.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2025 dan Semester I 2024

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina	1,965,000	401,011,308	(99.51)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	153,331,000	64,755,000	100.00
Jumlah	155,296,000	465,766,308	(66.66)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi.

Beban Pegawai
Rp2.008.352.312,0
0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.008.352.312,00 dan Rp2.114.703.749,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturasn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	30 Juni 2024	30 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	939,777,713	1,594,473,250	(41.06)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	836,117,387	1,108,320,696	(24.56)
Beban Lembur	85,473,000	115,921,000	(26.27)
Jumlah	1,861,368,100	2,818,714,946	(33.96)

Beban Persediaan
Rp33.458.626,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.458.626,00 dan Rp108.753.888,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024

URAIAN	Semester I TH 2024	Semester I TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	5,559,008	166,430,263	(96.66)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	282,283,450	(100.00)
Jumlah	5,559,008	448,713,713	(98.76)

*Beban Barang dan
Jasa Rp
471.461.040,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp471.41.040,00 dan Rp795.581.669,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2025 dan dan Semester I Tahun 2024 badalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

Uraian	Semester I Tahun 2024	Semester I Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	69,090,464	80,223,691	(13.88)
Beban Langganan Telepon	9,771,001	11,962,580	(18.32)
Beban Langganan Air	8,309,610	15,388,860	(46.00)
Beban Sewa	0	4,901,960	(100.00)
Beban Langganan dan jasa lainnya	0	126,104,615	(100.00)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	0	0	100.00
Beban Jasa lainnya	80,055,000	108,546,400	(26.25)
Beban Bahan	3,750,000	106,592,132	(96.48)
Beban Honor Output Kegiatan	2,040,000	8,120,000	(74.88)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	37,750,000	(100.00)
Beban Keperluan Perkantoran	256,348,784	628,080,066	(59.19)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	86,999,411	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	4,058,000	7,746,700	(47.62)
Beban Honor Operasional Satker	31,080,000	138,480,000	(77.56)
Beban Barang Operasional Lainnya	13,701,950	57,027,950	(75.97)
Belanja Modal BLU	0		0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	277,554,000	(100.00)
Jumlah	478,204,809	1,695,478,365	(71.80)

Beban

Pemeliharaan

Rp

241.895.871,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241.895.871,00 dan Rp398.423.945,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni

2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester I Tahun 2024	Semester I Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	243,476,720	243,651,846	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271,722,698	237,822,581	14.25
Beban persediaan untuk pemeliharaan	791,150	1,116,116	-29.12
Beban persediaan suku cadang	21,619,833	11,653,350	85.52
Jumlah	537,610,401	494,243,893	8.77

Beban Perjalanan Dinas Rp. 72.693.253,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan Per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.693.253,00 dan Rp203.777.932,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh blokir anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Semester II Tahun 2022	Semester II Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	264,547,441	230,694,685	14.67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,840,000	68,470,000	(33.05)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,600,000	0	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,450,034	0	#DIV/0!
Jumlah	371,437,475	299,164,685	24.16

Beban Barang untuk Diserahkan kepada

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat Rp0,00 Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Palembang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per Juni i 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 214.420.789,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun
2025 dan Semester II Tahun
2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Semester II TH 2022	Semester II TH 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	172,152,915	366,558,015
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60,344,314	117,847,248
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4,473,294	8,946,587
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	236,970,523	493,351,850
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	236,970,523	493,351,850

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Semester I TH 2024	Semester I Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp12.520.530,00)

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2025 sebesar (Rp.12.520.530,00) dan Semester I Tahun 2024 surplus pelepasan aset non lancarr yg merupakan penghapusan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin sebesar Rp14.697.000 sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024

URAIAN	Semester I TH 2024	Semester I TH 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	0	0	0.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	(100.00)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	(100.00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	(100.00)
Jumlah Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	(100.00)
Jumlah Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	(100.00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Rusak/Usang	12,520,530	0	0.00
Jumlah Beban Non Operasional	12,520,530	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Laninya	(12,520,530)	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(12,520,530)	0	(1.0)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp11.538.222.429
,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.538.222.429,00 dan Rp11.979.902.470,00.

Defisit LO
Rp(2.796.253.871,
00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(2.796.253.871,00) dan Rp(3.769.017.894,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0.00

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0.00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp5.968.750,00

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.968.750,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas 2.684.501.363,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.648.501.365,00 dan Rp3.418.992.162,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(155,296,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,997,962,171
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	6,842,666,171

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp(47.851.00,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.694.302.365,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp2.050.000,00 terdiri dari:

Detail transaksi Transfer Masuk dapat disajikan sebagai berikut :

AKUN	URAIAN AKUN	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Total			-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir

Rp11.396.438.673,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.396.438.673,00 dan Rp11.629.876.738,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 30 Juni 2024
1	8100125674811000	BPG.014.Stasiun KIPM Palembang	0

- Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Palembang Nomor : B.002/08.0/OT-220/I/2025 tanggal 04 Januari 2025 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Tahun 2025 Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Stasiun KIPM Palembang, Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi,M.Pi	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi,M.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Engla Asri,SE,MM	Pejabat Penandatanganan SPM
4	Bambang Lukito	Bendahara Pengeluaran
5	Mega Deswita	Bendahara Penerimaan

- Pada tanggal 15 Januari 2025 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang pertama dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2025 Revisi Pertama Alasan dilakukan revisi adalah Pengurangan Pagu DIPA ke Badan Karantina Indonesia
- Pada tanggal 25 Januari 2025 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kedua dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2025 Revisi Kedua Alasan dilakukan revisi adalah Blokir Anggaran.
- Pada tanggal 16 Februari 2025 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang ketiga dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2025 Revisi Ketiga Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.
- Pada tanggal 7 Maret 2025 Stasiun KIPM Palembang

melakukan revisi yang keempat dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2025 Revisi Keempat Alasan dilakukan revisi adalah Penambahan Gaji PPPK

- Pada tanggal 03 Mei 2025 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kelima dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2025 Revisi Kelima Alasan dilakukan revisi adalah Pagu Minus
- Pada tanggal 28 Mei 2025 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang keenam dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567481/2024 Revisi Keenam Alasan dilakukan revisi adalah Halaman III DIPA

